

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO
EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA DESA
BARATI KECAMATAN PAMONA TENGGARA**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

TRIVENA KRISTIANI PANGKONDOBU

91911404122057

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2023**

TRIVENA KRISTIANI PANGKONDOBU, NPM : 91911404122057.
**ANALISIS ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO
EKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA DESA BARATI
KECAMATAN PAMONA TENGGARA.** Dibimbing oleh Sudarto Usuli dan
Tabita R. Matana.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif, hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan pada penelitian ini dalam bentuk angka-angka dari Laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik observasi dokumentasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deksriptif kuantitatif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Barati sudah tergolong baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa selama tahun anggaran 2018-2022. Rasio efektivitasnya dikategorikan baik, karena mencapai angka 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Barati dalam mencapai target dana yang direncanakan berjalan baik. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Belanja mengalami naik-turun tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2018 rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja berkriteria baik dengan rata-rata rasionya sebesar 60,96% dan 92,12%. Sementara, selama tahun anggaran 2019-2022 berkategori rendah karena rata-rata rasionya <50%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Pengertian Desa.....	8
2.1.2 Pemerintah Desa.....	8
2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	9
2.1.4 Laporan Keuangan	10
2.1.5 Analisis Kinerja Keuangan	12
2.1.6 Manajemen Keuangan.....	13
2.1.7 Rasio Keuangan	13
2.1.8 Jenis-Jenis Rasio Keuangan	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.2. Metode Penelitian.....	22
3.3. Data dan Sumber Data.....	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Populasi dan Sampel.....	24
3.5.1 Populasi.....	24
3.5.2 Sampel.....	24
3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Definisi Operasional.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Barati	27
4.1.2 Letak Dan Batas Wilayah.....	28
4.1.3 Jumlah Penduduk	28
4.1.4 Sarana dan Prasarana.....	29
4.1.5 Pendidikan Masyarakat	29
4.1.6 Perekonomian Desa Barati.....	30
4.1.7 Pemerintah Desa.....	31
4.2 Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Rasio Efektivitas	32
4.2.2 Rasio Pertumbuhan	36
4.3 Pembahasan	42
4.3.1 Rasio Efektivitas Dana Desa.....	42
4.3.2 Rasio Pertumbuhan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51
PEDOMAN WAWANCARA	52
DAFTAR HASIL WAWANCARA	54

DOKUMENTASI.....	57
RIWAYAT HIDUP.....	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan suatu pengakuan dan penghormatan untuk memnfaatkan sumber daya yang ada serta kewenangan pembangunan secara penuh terhadap desa. Sedangkan menurut Endah (2018) Desa bukan dijadikan sebagai subjek untk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri. Pembangunan desa merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, yang tidak dapat dilepaskan dari otonomi desa. Menurut Setyowati (2019) Otonomi daerah merupakan suatu konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri oleh masing-masing desa atau daerah yang sangat berbeda-beda, semua itu merupakan langkah nyata pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeirntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena

aturan tersebut Pemerintah Pusat membuat kebijakan Dana Desa yang sekarang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8 Dana Desa adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 pasal 1 angka 9 yaitu Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Alokasi Dana Desa merupakan suatu dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa melalui dana perimbangan keuangan pusat maupun keuangan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan sebagai belanja aparatur serta operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pemberdayaan terhadap masyarakat. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Dana Desa jumlahnya tidaklah sedikit. Tercatat sekitar 1,8 Triliun Rupiah diberikan ke setiap desa. pada tahun 2019 tercatat anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat ke desa sebesar 70 Triliun Rupiah, ini merupakan angka yang fantastis. Oleh karena mengingat angka Dana Desa yang disalurkan ke tiap-tiap desa sangat besa, maka seluruh kegiatan yang berasal dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh

masyarakat desa agar tidak ada kesalah-pahaman antar pemerintah desa dan masyarakat desa.

Untuk mengelola keuangan desa tersebut sangat perlu diperhatikan asas transparan, akuntabel, pasrtisipatif, dan tertib serta disiplin, hal tersebut teelah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pembangunan desa yang sudah seharusnya menerapkan asas-asas terseut dalam mengelola keuangan desa, agar tidak ada lagi kasus-kasus penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, perlu dilaksanagn analisis kinerja keuangan desa (Eva,2019).

Analisis kinerja keuangan ini sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena dengan adanya analisis kinerja keuangan desa ini dapat membanu pemerintah desa untuk mengetahui kinerja pemerintahannya dalam periode waktu tertentu dan melihat pencapaian target keuangan yang telah ditentukan. Analisis laporan keuangan ini juga digunakan untuk membantu memahami laporan keuangan, menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam laporan ekuangan dan unutm mengevaluasi laporan serta kinerja keuangan.

Menurut Mahmudi (2019: 90) teknik yang digunakan dalam analisis laporan atau kinerja keuangan berdasarkan LRA diantaranya yaitu analisis pertumbuhan berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja serta analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas.

Ni Kadek Diksi Anugeraheni dan Gede Adi Yuniarta (2022) melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019”. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan rasio kemandirian rata-rata sebesar 3,92%, hal ini tergolong masih sangat rendah pemerintah desa Pejarakan belum maksimal dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Desanya. Namun, kinerja keuangan Pemerintah Pejarakan untuk tahun anggaran yang sama sudah sangat efektif dengan rata-rata sebesar 12,02%, hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan sudah mampu dalam melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien dengan rata-rata rasio sebesar 97,52%, ini menggambarkan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan yang dianggarkan mengeluarkan biaya atau belanja desa tergolong sangat besar. Pada tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan rasio aktivitas kinerja keuangan pemerintah desa dinilai dari rasio belanja operasi tergolong baik dalam mengeluarkan dananya untuk keperluan belanja operasi dengan rata-rata sebesar 58,99% . dan berdasarkan rasio belanja modal dengan rata-rata sebesar 41,01% dikategorikan juga baik karena pemerintah desa dalam mengalokasikan dananya sudah memperhatikan penggunaan dan untuk pembangunan desa. pada tahun anggaran 2015-2019 kinerja keuangan Pemerintah Desa pejaraka dinilai dari rasio pertumbuhan

mengalami peningkatan pada pendapatan asli desa dengan rata-rata sebesar 29,93%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa pejarakan sudah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diraih dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Fikry Nugraha Ramadhan (2018) melakukan penelitian tentang “Analisis Kemandirian, Efektivitas dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat”. Hasil dari penelitian ini yaitu selama tahun anggaran 2013-2017 di Daerah provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa kinerja kemandirian pemerinatah daerah ini masih sangat rendah dengan nilai rata-rata hanya sebesar 19,65%. Sedangkan kinerja efektivitas PAD di Sulawesi baat dinilai sudah efektif dengan nilai rata-rata sebesar 96,84% dan kinerja pertumbuhannya juga sudah bertumbuh dengan positif dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,87%. Irma Prasetyowati, Hari Purnomo dan Emmy Ermawati (2020) juga melakukan penelitian tentang “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sudah memperhatikan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Desa Barati merupakan desa yang berada di Kabupaten Poso, yang mata pencahariannya lebih banyak dibidang pertanian. Setiap tahunnya Anggaran Dana

Desa yang diterima oleh Desa Barati tidaklah sama. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Barati kecamatan pamona Tenggara ini selama periode tahun anggaran 2018-2022 mengalami naik turun. Anggaran Dana Desa yang diterima tersebut digunakan untuk pembangunan termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa. Pembangunan dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jika pembangunan di desa sudah berjalan baik berarti kinerja keuangan desa juga sudah baik. Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Barati dalam mengelola keuangan desa perlu diadakan analisis kinerja keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode yang lain. Dalam hal ini rasio yang digunakan oleh penulis yaitu Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dengan judul “ **Analisis Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dalam penulisan proposal ini yaitu : Untuk mengetahui seberapa baik Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk mencapai gelar SE pada Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan dan agar mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pengembangan kinerja keuangan untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara.

2. Bagi Desa

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman supaya bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

3. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khusus yang berfokus pada kajian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- ABU MASIHAD. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. *Transcommunication*, 53(1), 1–8.
- Annissa, Y. Nurdiana, M. Mujaddid, F. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana DEsa Dalam Mniingkatkan kinerja Keuangan (Sautu Studi Pada Kantor Desa Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)*.
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- ARYANI. (2022). *Analisis rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisisensi sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan pada kantor desa Tamalanrea kecamatan Bontomatene kabupaten Selayar*.
- Cibro, K. A. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi Koperasi Syariah Mitra NIaga Periode 2013-2017)*. 1–14.
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473.
- Gea, S. . F. (2022). *Kota Gunung Sitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020*.
- Harahap, A. W., . M., Ilmiha, J., & Effendi, S. (2021). *Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(1), 39–44.
- Hidayat, T. (2021a). *Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Good Village Governance (Studi pada Pemerintah Desa Kamiri 5(2), 57–62*.
- Hidayat, T. (2021b). *Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Good Vilaage Governance (Studi pada Pemerintah Desa Kamiri 5(2), 57–62*.
- Laia, G. (2019). *Analisis kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan toma kabupaten nias selatan skripsi*.
- M Ristardi. (2008). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan*. *Analisis Laporan Keuangan*, 1–123.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan Sistem*

- Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
- Manan, L. O. Ab., Djauhar, A., & Nurlela, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa. *Sultra Journal of Economic and Business*, 3(1), 8–19.
- Mandasari, D. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada CV. Awijaya Palembang*. 1–14.
- Manurung, F. . (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Kelapa Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020)*.
- Mide, S. (n.d.). *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Bank Syariah Indoensia (BSI) Melalui Pendekatan Income Statement dan Value Addeded Statement*.
- MUHAMMAD AMRI. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. INCIPNA Indonesia*. (3), 1–13.
- Mulyanti. (2017). Manajemen Keuangan Perusahaan dalam Perencanaan Pemasukan dan Pengeluaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 64(1), 62–71.
- Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Je & Kp*, 5(1), 73–88.
- Nurnilamsari, R. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Bank Mandiri Tbk Tahun 2016-2020*. 1–37.
- Pasaribu, A. R. . (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Prasetyowati, I., Purnomo, H., & ... (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Counting ...*, 75, 55–61.
- Puspitasari, D. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara Tahun 2014-2016)*.
- RADEN APRI SISWANTO. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan ALokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten LOMBOK Utara Tahun 2019 (Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara) Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.

- Ramadhan, F. N. (2017). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat*. 1392141013, 1–15.
- Ramlan & Sihombing, E. (2021). *Hukum Pemerintah Desa*. Enam Media.
- Rusmayanti, A. (2014). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Ngadirejan. *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 6.
- Sholikhah, I. M., & Khoiriawati, N. (2022). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis Value For Money. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 4(1), 38–54.
- Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Supriati, D. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. 6.
- Susliyanti, E. D. (2019). *Pengukuran Rasio Keuangan, Rasio Pertumbuhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress*. 1-18
- Utami, C. P. (2021). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Pengukur Keputusan Investasi Pada PT XI Axiata Tbk Tahun 2017-2020. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*.
- WAHYUDI. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas Pada Kantor Desa Salohe Kabupaten Sinjai*. 6.
- Wati, T. A., Anjani, H. P., I.J, L. R., Sinaga, L. F., Minallah, N., Nirawati, L., & Samsudin, A. (2022). *Journal Manajemen dan Bisnis*. 5(1), 1–9.